

## Menuju Kampus Ramah Disabilitas Di Perguruan Tinggi Keagamaan: Kajian dan Pengembangan Model Kebijakan Disabilitas di Uin Bandung

Asep Muhamad Iqbal<sup>\*1</sup>, M Pasqa<sup>2</sup>, Nuraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*e-mail: [am.iqbal@uinsgd.ac.id](mailto:am.iqbal@uinsgd.ac.id)

|            |            |            |                   |
|------------|------------|------------|-------------------|
| Received:  | Revised:   | Accepted:  | Available online: |
| 17.06.2025 | 29.06.2025 | 19.07.2025 | 30.07.2025        |

**Abstract:** *This study examines the development and implementation of disability inclusion policies at UIN Sunan Gunung Djati Bandung, a religious-based higher education institution in Indonesia. Despite international mandates and constitutional guarantees, many universities struggle to translate inclusive principles into practice, and UIN Bandung is no exception. To address this gap, we employed a participatory qualitative approach combining in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) with university leaders, faculty, students with disabilities. Data were coded thematically and visualized via word frequency analysis in NVivo 12 Plus, generating a word cloud to reveal dominant discourse themes. Findings show that "disability," "student," and "campus" dominate stakeholder narratives, reflecting a strong institutional focus on student experience. Participants emphasized two pillars of inclusion—formal policy frameworks and support services—while also highlighting structural barriers such as limited budgets, insufficient trained staff, and uneven campus accessibility. The prevalence of terms like "policy," "service," "budget" and "challenge" underscores a transitional phase in which normative commitment outpaces operational capacity. Drawing on agenda-setting and implementation theories, as well as Universal Design for Learning (UDL) principles, we synthesized these insights into a practical policy matrix. This matrix specifies concrete actions, responsible actors, implementation mechanisms, success indicators, and resource allocations, making it adaptable for other universities. In conclusion, UIN Bandung must balance its normative vision of inclusion with targeted investments in infrastructure, capacity building, and participatory governance. Our model offers a replicable roadmap for religious and secular institutions alike, bridging the gap between policy intent and inclusive practice.*

**Keywords:** *Students with Disabilities, Disability Inclusion, Inclusive Higher Education, Inclusive Education Policy, University Disability Policy, Inclusive Teaching Methods, Campus Accessibility.*

**Abstrak:** Studi ini mengkaji pengembangan dan implementasi kebijakan inklusi disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebuah perguruan tinggi berbasis agama di Indonesia. Meskipun terdapat mandat internasional dan jaminan konstitusional, masih terdapat perguruan tinggi kesulitan menerapkan prinsip-prinsip inklusif, dan UIN Bandung tidak terkecuali. Untuk mengatasi kesenjangan ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif yang menggabungkan wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan pimpinan universitas, dosen, dan mahasiswa penyandang disabilitas. Data dikodekan secara tematis dan divisualisasikan melalui analisis frekuensi kata di NVivo12 Plus, menghasilkan *words cloud* untuk mengungkap tema wacana yang dominan. Temuan menunjukkan bahwa "disabilitas", "mahasiswa", dan "kampus" mendominasi narasi pemangku kepentingan, yang mencerminkan fokus institusi yang kuat pada pengalaman mahasiswa. Para peserta menekankan dua pilar inklusi, kerangka kebijakan formal dan layanan pendukung, sementara juga menyoroti hambatan struktural seperti anggaran terbatas, staf terlatih yang tidak memadai, dan aksesibilitas kampus yang tidak merata. Prevalensi istilah seperti "kebijakan", "layanan", "anggaran" dan "tantangan" menggarisbawahi fase transisi di mana komitmen normatif melampaui kapasitas operasional. Berlandaskan teori penetapan agenda dan implementasi, serta prinsip-prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL), kami mensintesis wawasan ini ke dalam matriks kebijakan praktis. Matriks ini merinci tindakan konkret, aktor yang bertanggung jawab, mekanisme implementasi, indikator keberhasilan, dan alokasi sumber daya, sehingga dapat diadaptasi untuk universitas lain. Simpulannya, UIN Bandung harus menyeimbangkan visi normatifnya tentang inklusi dengan investasi yang terarah dalam infrastruktur, pengembangan kapasitas, dan tata kelola partisipatif. Model kami menawarkan peta jalan yang dapat direplikasi untuk lembaga keagamaan maupun sekuler, menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik inklusif.

**Kata kunci:** Mahasiswa disabilitas, Inklusi Disabilitas, Pendidikan Tinggi Inklusif, Kebijakan Pendidikan Inklusif, Kebijakan Disabilitas Universitas, Metode Pengajaran Inklusif, Aksesibilitas Kampus

## 1. PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan isu hak asasi manusia yang mendasar dan harus menjadi perhatian utama di institusi pendidikan tinggi (Degener, 2016; Heyer, 2021). Berdasarkan Konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) dan berbagai peraturan internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011, negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas (Simkiss, 2013).

Namun, realitas menunjukkan bahwa hak-hak ini seringkali diabaikan di sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Data dari Komite Nasional Disabilitas (KND) mengungkapkan bahwa hanya 2,8 persen penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Kartika et al., 2024). Selain itu, dari 4.523 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 90 universitas atau sekitar 1,99 persen yang secara resmi menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Beberapa perguruan tinggi yang memiliki unit layanan disabilitas antara lain Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Bina Nusantara, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin. (<https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/3/unit-layanan-disabilitas>)

Kenyataan ini mengakibatkan rendahnya jumlah mahasiswa disabilitas yang terdaftar dan menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi, menciptakan hambatan struktural yang menghalangi hak fundamental mereka untuk mengakses pendidikan yang setara dan bermutu (Mariska et al., 2024). Dalam konteks ini, kebijakan inklusif di perguruan tinggi tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi langkah konkret menuju keadilan sosial.

Literatur tentang disabilitas di pendidikan tinggi sudah tumbuh cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir (e.g. Brewer et al 2023; Dyliaeva et al 2024; Alrusaiyes 2024; Fernández-Batanero 2022; Gin et al 2022; Heffernan 2023; Mogaji et al 2022; Morina et al 2022; Oslund 2014; Garcia et al 2024; Ristad 2024; Riddel 2014; Witham 2024; and Zhou 2023). Itu semua merefleksikan tumbuhnya pengakuan terhadap pentingnya akses yang setara bagi mahasiswa disabilitas.

Sejumlah penelitian menekankan pada peranan identitas-diri dan advokasi-diri dalam pengalaman mahasiswa disabilitas di pendidikan tinggi. Bartolo et al. (2023), misalnya, melakukan tinjauan sistematis dan menemukan bahwa mengembangkan identitas-diri, mengatasi stigma, dan meningkatkan skill advokasi-diri merupakan hal krusial bagi keberhasilan dan kesejahteraan mental mahasiswa di pendidikan tinggi. Elemen-elemen tersebut membantu mahasiswa merespon dengan memadai berbagai tantangan yang disebabkan oleh disabilitas mereka dan mencari penyelesaian yang dibutuhkan.

Nilai akomodasi individu dalam tugas kuliah dan penilaian telah dibahas dalam berbagai penelitian. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa layanan dukungan yang disesuaikan, seperti tambahan waktu dalam ujian dan akses ke teknologi bantu, secara signifikan meningkatkan kinerja akademik dan kepuasan mahasiswa penyandang disabilitas. Bartolo et al. (2023), misalnya, menemukan bahwa mahasiswa sangat menghargai akomodasi ini, yang penting untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang akademik.

Memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas di perguruan tinggi sangat penting karena institusi ini memiliki peran kunci dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan toleran (Akoto et al., 2022). Pendidikan tinggi adalah ruang di mana generasi muda ditempa untuk berpikir kritis, menghargai keragaman, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan di masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, perguruan tinggi dapat memberikan teladan bagi sektor-sektor lain dalam menghargai dan menghormati keberagaman, termasuk keberagaman kemampuan fisik dan mental (García et al., 2019). Inklusi disabilitas di perguruan tinggi juga meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan akademik dan profesional, yang pada akhirnya dapat mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat luas (Espada-Chavarria et al., 2021).

Karya-karya di atas memberikan pemahaman penting terkait disabilitas dan kebijakan disabilitas di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam literatur terkait kebijakan administrator universitas tentang disabilitas. Celah ini mencakup kurangnya kebijakan disabilitas yang kohesif dan diimplementasikan secara seragam yang disepakati dan dibagikan oleh para administrator atau pimpinan universitas. Hal ini berdampak pada konsistensi dan efektivitas layanan dukungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, literatur yang ada lebih banyak memfokuskan pada konteks universitas yang 'sekuler' atau tidak berbasis keagamaan.

Mengisi kekosongan riset dalam perumusan, kesepakatan, dan implementasi kebijakan disabilitas oleh administrator universitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan mendukung. Penelitian selanjutnya harus berfokus pada pengembangan prosedur standar, peningkatan pelatihan bagi administrator, penyediaan sumber daya yang memadai, dan melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam pengembangan kebijakan dengan memperhatikan konteks spesifik universitas seperti keagamaan. Dengan mengatasi area-area ini, institusi pendidikan tinggi dapat lebih menjamin bahwa kebijakan mereka secara efektif mendukung semua mahasiswa. Untuk merespon ini, penelitian ini akan mengatasi celah tersebut dengan menyusun kebijakan disabilitas yang terpadu dan kohesif dengan rujukan pada kasus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) -sebuah universitas negeri berbasis keislaman- dan pihak-pihak terkait lainnya.

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model kebijakan inklusi di UIN Bandung yang secara khusus memperhatikan tiga aspek utama aksesibilitas: sebelum, selama, dan setelah masa studi di perguruan tinggi. Pertama, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akses inklusi dapat ditingkatkan bagi calon mahasiswa, dosen, dan staf dengan menyediakan informasi yang komprehensif tentang fasilitas dan dukungan disabilitas melalui platform online dan offline, sebagai upaya untuk membangun kesiapan awal. Kedua, penelitian ini meninjau akses inklusi di lingkungan kampus, mencakup infrastruktur dan praktik pembelajaran yang ramah disabilitas, di mana inclusive learning dan inclusive teaching menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan akademik yang setara. Ketiga, setelah masa studi, penelitian ini mengkaji upaya memperluas akses informasi mengenai peluang karier, magang, dan pendidikan lanjutan bagi lulusan dengan disabilitas. Dengan navigasi ini, paper ini bertujuan menyediakan panduan komprehensif bagi pengembangan kebijakan yang menjamin inklusi penuh dan keberlanjutan bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan perjalanan akademik mereka di perguruan tinggi.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatoris (*participatory qualitative research*) yang sesuai untuk menjembatani antara kebutuhan empiris di lapangan dan perumusan kebijakan berbasis realitas sosial. Pendekatan ini menempatkan partisipan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses reflektif dan transformatif guna menciptakan solusi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan komunitas (Cornwall & Jewkes, 1995; Stringer, 2014).

Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan para pemangku kepentingan utama, seperti pimpinan universitas, mahasiswa penyandang disabilitas, serta perwakilan komunitas advokasi. *FGD* digunakan untuk menggali pemahaman kolektif, dinamika sosial, serta membangun konsensus atas arah kebijakan yang inklusif dan berkeadilan (Krueger & Casey, 2014). Sesi *FGD* dilakukan dalam kelompok kecil berisi 6 orang, difasilitasi oleh moderator dengan panduan diskusi terbuka dan direkam secara etis sesuai persetujuan partisipan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan kedalaman dan relevansi data (Patton, 2014). Proses pengumpulan data dilengkapi dengan observasi langsung terhadap fasilitas kampus dan dokumentasi kebijakan internal.

Seluruh data dianalisis menggunakan perangkat lunak *NVivo 12 Plus*, yang memungkinkan eksplorasi mendalam melalui coding tematik dan visualisasi narasi dominan, seperti *word cloud analysis*. Analisis mengikuti alur yang dikembangkan Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994), yakni

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dikembangkan dalam bentuk narasi tematik dan akan dijadikan dasar penyusunan model kebijakan inklusi disabilitas di UIN Bandung.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan kampus yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dukungan penuh dari pimpinan universitas menjadi pendorong utama dalam pengembangan fasilitas inklusif, dengan rencana strategis jangka panjang untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh kampus. Meskipun terdapat tantangan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, UIN Bandung tetap fokus pada upaya bertahap untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi mahasiswa serta staf penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini menggambarkan visi jangka panjang UIN Bandung untuk menjadi kampus yang benar-benar inklusif, di mana semua kalangan dapat mengakses pendidikan dan fasilitas dengan setara. Dadan Rusmana, Wakil Rektor I Bidang Akademik, menegaskan bahwa UIN Bandung memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan kampus inklusif dengan memastikan kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Dadan Rusmana berkata:

“Kami ingin membangun lingkungan akademik yang tidak hanya aksesibel secara fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan belajar mahasiswa disabilitas dengan berbagai inisiatif, termasuk pelatihan dosen dalam pengajaran inklusif dan peningkatan layanan pendukung bagi mereka” (Wawancara, 11 Oktober 2024).

Gambar 1. Hasil Observasi Fasilitas Ramah Disabilitas



Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Dari hasil observasi, berbagai fasilitas ramah disabilitas telah tersedia di beberapa gedung fakultas dan non-fakultas, seperti *ramp* dan *tactile paving*, yang memberikan aksesibilitas lebih baik bagi penyandang disabilitas. Namun, ketersediaannya belum merata di seluruh kampus. Beberapa fasilitas penting, seperti *lift*, toilet ramah disabilitas, dan area parkir khusus, masih terbatas di beberapa lokasi, terutama di gedung-gedung utama seperti perpustakaan dan beberapa fakultas yang memiliki lebih dari satu lantai. Ketidakterataan ini menyebabkan tantangan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai fasilitas kampus secara optimal.

Meskipun demikian, UIN Bandung tampaknya belum memiliki semacam *university disability policy* atau kebijakan disabilitas universitas yang sistematis dan tertulis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan visi UIN Bandung sebagai kampus inklusif selain percepatan peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan secara adil dan nyaman. Tedi Priatna, Wakil Rektor II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mengatakan bahwa peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari rencana strategis UIN Bandung dan telah masuk dalam blueprint pengembangan kampus. Dia berkata:

“Kami menyadari pentingnya aksesibilitas yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas ramah disabilitas bukan hanya menjadi prioritas, tetapi juga sudah dirancang dalam perencanaan jangka panjang universitas. Kami berkomitmen untuk terus merealisasikan peningkatan ini secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang tersedia, agar kampus kami benar-benar menjadi lingkungan yang inklusif dan nyaman bagi semua”. (Wawancara, 10 Oktober 2024).

### Aksesibilitas Sebelum Masa Studi bagi Calon Mahasiswa Disabilitas

Aksesibilitas bagi calon mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi merupakan tahapan penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan merata. UIN Bandung menyadari pentingnya inklusivitas bagi penyandang disabilitas, yang mencakup kebutuhan khusus baik dari segi infrastruktur maupun layanan pendukung. Dengan menyediakan akses dan informasi yang tepat sejak awal, UIN Bandung dapat membantu calon mahasiswa disabilitas dalam mempersiapkan diri secara lebih baik untuk menghadapi kehidupan akademik. Langkah ini tidak hanya menjamin hak atas pendidikan yang setara, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan rasa percaya diri mereka sebagai bagian dari komunitas kampus.

Sebagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas, UIN Bandung telah membuka jalur penerimaan khusus untuk kelompok rentan, termasuk calon mahasiswa disabilitas, sebagai komitmen kampus dalam menyediakan akses yang lebih setara bagi semua mahasiswa. Hal ini diwujudkan dalam penyediaan jalur inklusif dalam proses pendaftaran untuk calon mahasiswa disabilitas di UIN Bandung sebagai langkah konkret universitas dalam mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi. Selain itu, disediakan ruangan ujian dan staf pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhan calon mahasiswa disabilitas sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam seleksi akademik tanpa merasa terbatas oleh hambatan fisik atau sensorik. Tedi Priatna, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Bandung, menyatakan:

“Universitas telah menyediakan beberapa jalur inklusif dalam proses pendaftaran untuk calon mahasiswa disabilitas. Jalur ini memungkinkan mereka mengikuti seleksi dengan dukungan khusus, seperti ruangan ujian yang disesuaikan dan staf pendamping”. (Wawancara, 8 Oktober 2024).

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih dalam proses pengembangan, terutama untuk memastikan fasilitas dan layanan yang lebih komprehensif bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pimpinan kampus telah berupaya untuk menciptakan kebijakan untuk memperkuat sosialisasi mengenai fasilitas dan dukungan yang tersedia, baik melalui platform online maupun offline, agar calon mahasiswa disabilitas dapat mengetahui dan memahami layanan yang mereka butuhkan. Informasi yang jelas dan komprehensif mengenai layanan disabilitas, seperti fasilitas kampus yang ramah disabilitas dan layanan pendampingan, menjadi kunci untuk membangun rasa aman dan kesiapan calon mahasiswa disabilitas. Saat ini, UIN Bandung sedang berproses untuk menyempurnakan penyampaian informasi ini di berbagai media resmi, termasuk website universitas, sehingga lebih mudah diakses oleh calon mahasiswa. Dengan informasi yang mudah diakses, calon mahasiswa disabilitas dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang layanan dan fasilitas yang akan mereka temui di kampus, yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam merencanakan studi dengan lebih percaya diri. Husnul Qodim, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyatakan:

“Kami memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa memandang latar belakang dan kondisi mereka, mendapatkan layanan yang adil dan setara. Kampus ini adalah rumah bagi semua, dan kami berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman serta

mendukung bagi setiap individu yang menempuh pendidikan di sini". (Wawancara, 16 Oktober 2024).

Selain penyediaan informasi mengenai jalur penerimaan, akses terhadap fasilitas fisik seperti ramp, lift, dan area parkir khusus juga menjadi bagian penting dalam kesiapan akses bagi calon mahasiswa disabilitas. Di UIN Bandung, beberapa gedung baru telah dilengkapi dengan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas kampus. Kendati demikian, beberapa gedung lama masih dalam proses penyesuaian agar dapat sepenuhnya mendukung kebutuhan mobilitas mahasiswa disabilitas. Penyampaian informasi terkait ketersediaan dan pengembangan fasilitas ini menjadi langkah penting untuk membantu calon mahasiswa memahami kondisi fisik kampus dan menyesuaikan ekspektasi mereka secara realistis.

Informasi mengenai fasilitas ini penting disebarkan dengan baik sehingga calon mahasiswa dengan disabilitas mengetahui bahwa kampus berkomitmen untuk menyediakan aksesibilitas dan memberikan dukungan penuh bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Persiapan awal ini tidak hanya menyangkut fasilitas fisik dan layanan khusus, tetapi juga menyangkut aspek mental dan logistik. Calon mahasiswa disabilitas yang memahami dengan baik fasilitas dan dukungan yang tersedia di kampus akan merasa lebih siap dan nyaman saat memasuki kehidupan kampus. Hal ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga memberi mereka motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan sosial di kampus, menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif.

Universitas memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang terstruktur dan mudah diakses melalui panduan resmi. Informasi ini bisa mencakup detail mengenai layanan disabilitas, prosedur mendapatkan bantuan, serta kontak penting untuk pertanyaan lebih lanjut. Dengan menyediakan panduan yang jelas, kampus membantu calon mahasiswa disabilitas dalam mempersiapkan diri dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang lengkap untuk mendukung kebutuhan mereka di kampus.

Dalam upaya memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, kampus dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau komunitas disabilitas. Kolaborasi ini dapat membantu universitas dalam memperkaya informasi yang disampaikan kepada calon mahasiswa disabilitas, sekaligus memperkenalkan mereka pada lingkungan akademik yang inklusif. Dukungan dari lembaga eksternal akan membantu calon mahasiswa dalam memahami lebih dalam tentang layanan yang tersedia serta memberikan gambaran tentang kehidupan kampus yang lebih inklusif. Langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif dengan semakin banyaknya mahasiswa disabilitas yang mendaftar dan berhasil menyelesaikan studi di pendidikan tinggi.

Melalui upaya penyediaan aksesibilitas yang terstruktur, informasi yang transparan, dan komitmen yang nyata terhadap inklusi, UIN Bandung berupaya menjadi kampus yang ramah dan inklusif bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan visi sosial universitas yang dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain di Indonesia dalam menciptakan lingkungan akademik yang setara dan inklusif.

### **Aksesibilitas Selama Masa Studi bagi Mahasiswa Disabilitas**

Aksesibilitas selama masa studi bagi mahasiswa disabilitas adalah hal krusial lainnya untuk memastikan partisipasi penuh mahasiswa dalam menjalani pengalaman akademik di institusi pendidikan tinggi. Di UIN Bandung, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung kebutuhan disabilitas, seperti *ramp*, *lift*, paving taktil, toilet, dan area parkir khusus. Namun, keterbatasan anggaran dan prioritas pada fasilitas bagi mahasiswa umum sering kali membatasi pengembangan infrastruktur inklusif di seluruh gedung kampus, terutama pada bangunan lama yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Seiring dengan langkah-langkah ini, UIN Bandung telah mengupayakan penyesuaian di beberapa bangunan baru untuk memenuhi standar aksesibilitas. Tedi Priatna, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, menyatakan:

“Gedung-gedung baru telah dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas seperti ramp dan *lift*, serta area parkir khusus. Namun, untuk bangunan lama, penyesuaian ini masih berlangsung secara bertahap berdasarkan anggaran yang dialokasikan tiap tahunnya. Meski terdapat keterbatasan finansial, komitmen universitas dalam menyediakan fasilitas yang inklusif tetap terlihat jelas dalam proses pengembangan ini” (Wawancara, 8 Oktober 2024).

Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai juga berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan mahasiswa disabilitas selama studi mereka. Namun, seperti yang disampaikan oleh Regina, mahasiswa tunanetra, fasilitas guiding block belum tersedia sehingga ia mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari di kampus. Ketiadaan fasilitas dasar ini menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur yang mendukung kemandirian mobilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi di lingkungan kampus. Menanggapi hal ini, Tedi Priatna, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mengakui bahwa masih ada beberapa aspek infrastruktur yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Dia berkata:

“Kami memahami bahwa aksesibilitas yang lebih baik sangat dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk fasilitas seperti *guiding block* untuk tunanetra. Saat ini, kami sedang mengidentifikasi area-area prioritas di kampus yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas, dan ini akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur kampus secara bertahap”. (Wawancara, 10 Oktober 2024).

Tantangan serupa juga dialami oleh mahasiswa tunarungu seperti Sheva, yang menyampaikan bahwa ia sering kesulitan memahami pembelajaran karena ketiadaan dukungan seperti penerjemah bahasa isyarat atau Juru Bahasa Isyarat (JBI). Ketidaktersediaan layanan ini membuat mahasiswa tunarungu harus mencari solusi mandiri atau bergantung pada bantuan teman. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan dukungan yang lebih terstruktur dan konsisten agar mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dengan setara. Ahmad Fathonih, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Kelembagaan, menegaskan bahwa UIN Bandung terus berupaya menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan layanan bagi mahasiswa disabilitas. Dia berkata:

“Kami sedang memperluas kerja sama dengan lembaga yang berfokus pada advokasi disabilitas untuk menyediakan dukungan lebih baik bagi mahasiswa tunarungu, termasuk akses ke Juru Bahasa Isyarat (JBI). Harapannya, melalui kolaborasi ini, mahasiswa disabilitas dapat memperoleh fasilitas yang lebih memadai agar mereka dapat belajar dengan lebih nyaman dan setara”. (Wawancara, 10 Oktober 2024)

Selain infrastruktur, implementasi metode pembelajaran yang inklusif sangat diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan akademik mahasiswa disabilitas. Saat ini, banyak dosen di UIN Bandung belum mendapatkan pelatihan khusus dalam pengajaran inklusif, sehingga mahasiswa disabilitas terkadang merasa tidak diperlakukan setara. Dadan Rusmana, Wakil Rektor I Bidang Akademik, menyatakan:

“Meskipun pelatihan formal mengenai metode pengajaran inklusif belum sepenuhnya tersedia, UIN Bandung sedang dalam proses mengembangkan aturan dan panduan untuk mendukung dosen dalam mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih terstruktur di masa mendatang, sehingga setiap dosen memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai dalam menerapkan pengajaran inklusif di kelas”. (Wawancara, 11 Oktober 2024)

Pernyataan mengenai komitmen UIN Bandung dalam mengembangkan pelatihan formal untuk metode pengajaran inklusif adalah langkah positif yang dapat membantu dosen mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas secara lebih efektif. Dengan dukungan terstruktur ini, diharapkan setiap dosen mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif.

Namun, tantangan bagi mahasiswa disabilitas tidak hanya terbatas pada proses pengajaran, tetapi juga muncul dalam evaluasi akademik. Regina, salah satu mahasiswa tunanetra, mengungkapkan kesulitannya saat menghadapi ujian tulis yang mengharuskan format tulisan tangan, yang menjadi kendala tambahan bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Dia berkata:

“Setiap kali ada ujian tulis, saya harus berjuang ekstra keras karena tidak bisa menulis tangan dengan cara yang sama seperti mahasiswa lain. Saya harus mencari cara sendiri, entah meminta bantuan teman atau menggunakan teknologi yang sering kali tidak didukung dalam sistem ujian kampus. Ini sangat melelahkan dan membuat saya merasa tidak mendapatkan kesempatan yang setara”. (Wawancara, 12 Oktober 2024)

Alternatif digital yang bisa menjadi solusi belum diterapkan secara menyeluruh di kampus, menunjukkan perlunya kebijakan evaluasi yang lebih fleksibel. Fleksibilitas dalam evaluasi akademik akan sangat membantu mahasiswa disabilitas untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa terhambat oleh keterbatasan fisik. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, mahasiswa disabilitas juga menghadapi kendala dalam menerima materi yang disampaikan. Hal ini diakui oleh Wakil Rektor II bahwa pengaturan tempat duduk dan fasilitas khusus bagi mahasiswa disabilitas di kelas belum disediakan secara konsisten, dan pendamping khusus pun masih terbatas. Ketiadaan layanan pendukung di kelas ini menyoroti perlunya layanan yang lebih adaptif untuk memastikan mahasiswa disabilitas dapat berpartisipasi penuh di ruang kelas.

Kendala lain muncul pada penyesuaian kurikulum yang responsif terhadap disabilitas, yang saat ini belum menjadi prioritas utama di UIN Bandung. Mahasiswa seperti Sheva merasakan bahwa kurangnya adaptasi kurikulum membuat pembelajaran lebih sulit untuk diikuti. Husnul Qodim, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, juga mengakui bahwa belum ada panduan khusus bagi dosen dalam mendukung mahasiswa disabilitas di dalam kurikulum, yang mencerminkan bahwa prinsip inklusi belum sepenuhnya tercermin dalam metode pengajaran. Sheva menjelaskan:

“Saat ini memang belum tersedia panduan khusus bagi dosen untuk mendukung mahasiswa disabilitas dalam kurikulum. Namun, kami sedang merancang langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip inklusi dalam metode pengajaran. Kami percaya bahwa upaya ini akan membantu dosen dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih setara dan mendukung bagi seluruh mahasiswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus”. (Wawancara, 16 Oktober 2024)

Pernyataan Wakil Rektor III ini menunjukkan kesadaran dan komitmen UIN Bandung dalam merespons kebutuhan mahasiswa disabilitas dengan merancang langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip inklusi dalam metode pengajaran. Meskipun panduan khusus bagi dosen belum tersedia, inisiatif untuk mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap disabilitas adalah langkah positif yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih setara bagi seluruh mahasiswa. Dengan kurikulum yang terstruktur secara inklusif, dosen akan memiliki panduan yang jelas untuk mengadaptasi materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas, sehingga pembelajaran menjadi lebih aksesibel dan mendukung keterlibatan aktif mereka di kelas. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran, serta memperkuat lingkungan akademik yang menghargai keberagaman dan memastikan bahwa setiap mahasiswa dapat mencapai potensi penuh mereka dalam suasana yang mendukung dan inklusif.

Inisiatif kurikulum inklusif ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk menciptakan pengalaman belajar yang setara. Selain pengembangan kurikulum, UIN Bandung juga memperluas upaya inklusivitasnya melalui rencana pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sebagai pusat layanan yang dirancang khusus, ULD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas dengan menyediakan juru bahasa isyarat, pendampingan khusus, dan fasilitas pembelajaran yang lebih adaptif. Meski masih dalam tahap awal, rencana pembentukan unit ini memperlihatkan komitmen UIN Bandung untuk terus meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas secara komprehensif. Irma Riyani, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Bandung, menyatakan:



“Rencana pembentukan Unit Layanan Disabilitas di UIN Bandung merupakan wujud komitmen nyata kami untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan bagi mahasiswa disabilitas. Dengan adanya ULD ini, kami berharap dapat menyediakan dukungan yang lebih terstruktur, termasuk juru bahasa isyarat dan pendampingan khusus, sehingga tercipta lingkungan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa.” (Wawancara, 10 Oktober 2024)

Pembentukan ULD di UIN Bandung memiliki potensi besar untuk mendukung terciptanya akses yang lebih luas dan terpadu bagi mahasiswa disabilitas. Dengan keberadaan unit ini, mahasiswa disabilitas akan memiliki pusat layanan yang siap memberikan dukungan komprehensif, mulai dari penerjemah bahasa isyarat hingga pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. ULD ini juga berfungsi sebagai wujud konkret komitmen UIN Bandung terhadap kesetaraan dalam pendidikan, menghilangkan hambatan struktural yang sering kali menghambat akses mereka terhadap pembelajaran yang bermakna. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa disabilitas, tetapi juga menguatkan lingkungan kampus sebagai ruang inklusif yang menghargai keberagaman. Keberadaan fasilitas ini akan menginspirasi mahasiswa disabilitas untuk lebih aktif dan percaya diri, sekaligus memupuk budaya inklusivitas di kalangan dosen dan mahasiswa lainnya.

Dengan upaya peningkatan infrastruktur, pelatihan dosen dalam inklusivitas, serta pembentukan unit layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas, UIN Bandung berharap dapat menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar mendukung keberagaman dan inklusi. Pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan universitas yang inklusif bagi semua mahasiswa, menciptakan pengalaman akademik yang setara dan mendukung potensi penuh setiap mahasiswa.

### **Memperluas Akses Karier dan Pendidikan Lanjutan Bagi Lulusan Disabilitas**

Akses ke dunia kerja bagi lulusan disabilitas dari perguruan tinggi memainkan peran penting dalam memastikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga mempersiapkan lulusannya, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat bertransisi ke dunia kerja dengan percaya diri. Untuk lulusan disabilitas, tantangan yang dihadapi sering kali berlipat karena mereka harus menghadapi hambatan fisik, sosial, dan struktural yang masih ada di banyak sektor. Dengan menyediakan dukungan yang komprehensif, mulai dari informasi terkait peluang karier, program magang yang inklusif, hingga koneksi dengan perusahaan yang memiliki inisiatif keberagaman, adalah langkah yang krusial. Upaya ini tidak hanya membantu lulusan disabilitas dalam menemukan jalur karier yang sesuai, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dengan meningkatkan penerimaan dan kesetaraan di lingkungan kerja.

Dalam konteks ini, UIN Bandung sudah mulai mengambil langkah dengan memberikan informasi terkait karier bagi lulusan disabilitas melalui pusat karir, meskipun pendekatannya belum sepenuhnya difokuskan pada kebutuhan khusus mereka. Ahmad Fathonih, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Kelembagaan, menyatakan:

“Pusat Karier kampus mulai mengadopsi pendekatan inklusif, membuka jalan bagi kesempatan karier yang setara untuk semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun kami masih berada pada tahap awal dan masih banyak yang perlu dikembangkan, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar para lulusan kami dapat mengatasi tantangan unik yang mungkin mereka hadapi di dunia kerja”. (Wawancara, 8 Oktober 2024)

Mahasiswa seperti Sheva, yang memiliki keterbatasan pendengaran, menyoroti pentingnya pelatihan khusus dan informasi pekerjaan yang lebih mudah diakses bagi lulusan disabilitas. Ia berharap kampus dapat menyediakan jalur khusus yang menghubungkan lulusan disabilitas dengan perusahaan yang memiliki lingkungan kerja inklusif. Ia menyampaikan bahwa:

“kampus harusnya bisa menyediakan jalur khusus yang menghubungkan kami, lulusan disabilitas, dengan perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang inklusif” (Wawancara, 18 Oktober 2024).

Menurutnya, dengan adanya jalur khusus ini, lulusan disabilitas akan lebih mudah diterima di dunia kerja tanpa khawatir tentang keterbatasan fisik atau sensorik yang dapat menghambat mereka. Dalam konteks magang dan praktik kerja lapangan, UIN Bandung saat ini masih memiliki kekurangan dalam upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Ahmad Fathonih, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Kelembagaan di UIN Bandung, mengakui bahwa program magang di kampus belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas. Dia menjelaskan:

“Program magang di UIN Bandung saat ini masih dalam tahap pengembangan untuk dapat sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan fisik atau sensorik yang dimiliki mahasiswa disabilitas. Untuk sementara, mahasiswa disabilitas sering kali harus mencari penempatan magang secara mandiri, yang menambah tantangan bagi mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Namun, ini juga merupakan tanggung jawab bersama antara institusi pendidikan dan berbagai perusahaan serta instansi untuk berkolaborasi dalam menciptakan peluang magang yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus” (Wawancara, 10 Oktober 2024)

Selain peluang karier dan kesempatan magang, Ahmad Fathonih juga menyadari kurangnya sosialisasi terkait akses ke pendidikan lanjutan bagi lulusan disabilitas yang berminat melanjutkan studi. Dia menyatakan bahwa meskipun prinsip kesetaraan dalam pendidikan diakui, implementasinya belum sepenuhnya tercermin dalam penyediaan layanan bagi lulusan disabilitas yang ingin melanjutkan ke jenjang akademik lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Beliau mengatakan bahwa belum ada panduan khusus atau kebijakan yang benar-benar terstruktur untuk mendampingi lulusan disabilitas dalam pencarian beasiswa atau program pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, UIN Bandung tampaknya memiliki kesadaran pentingnya mengatasi isu minimnya akses ke dunia kerja dan pendidikan bagi lulusan mahasiswa dengan disabilitas. Pendekatan kolaboratif dengan lembaga eksternal yang fokus pada dukungan karier untuk penyandang disabilitas juga bisa menjadi solusi bagi persoalan ini. Ahmad Fathonih menerangkan:

“Kerjasama dengan lembaga eksternal yang memiliki fokus pada penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas dapat membuka lebih banyak peluang bagi lulusan disabilitas, baik dalam bentuk program magang maupun akses ke perusahaan yang sudah memiliki inisiatif inklusif. Dengan demikian, kemitraan ini bisa menciptakan jembatan yang lebih solid antara kampus dan dunia kerja, sehingga transisi lulusan disabilitas bisa berlangsung lebih lancar”. (Wawancara, 10 Oktober 2024)

Lebih jauh, Wakil Rektor IV ini menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga eksternal sebagai upaya strategis dalam mendukung karier lulusan disabilitas. Pendekatan ini tidak hanya membuka akses lebih luas ke program magang dan peluang kerja, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas;

“Dengan membangun kemitraan dengan perusahaan yang memiliki inisiatif keberagaman, UIN Bandung dapat memastikan bahwa lulusan disabilitas menerima dukungan yang berkelanjutan dalam transisi mereka ke dunia kerja. Kolaborasi ini juga berfungsi sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja, sehingga lulusan disabilitas dapat memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri dan memiliki akses yang setara terhadap kesempatan profesional” (Wawancara, 10 Oktober 2024).

Merespon ini, mahasiswa disabilitas menekankan bahwa mahasiswa disabilitas membutuhkan akses informasi yang mudah dan komprehensif mengenai peluang karier serta program pendidikan lanjutan. Misalnya, Sheva, mahasiswa tuna rungu, menyampaikan bahwa:



Gambar 2. Analisis *word cloud* yang dihasilkan oleh NVivo 12 Plus memperlihatkan betapa kuatnya fokus wacana kebijakan disabilitas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada pengalaman mahasiswa sebagai pusat perhatian. Istilah “disabilitas” mendominasi pembicaraan partisipan dengan frekuensi kemunculan mencapai 138 kali, menegaskan bahwa setiap diskusi pada hakikatnya berpusat pada upaya memahami dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Keberadaan kata “mahasiswa” yang muncul 108 kali dan “kampus” sebanyak 75 kali semakin menegaskan bahwa narasi kebijakan inklusi ini terajut erat dengan realitas akademik sehari-hari. Melalui visualisasi ini, tampak pula bahwa terminologi “kebijakan” dan “layanan” menjadi pilar utama pembicaraan, dimana kedua istilah tersebut, masing-masing dengan 69 dan 50 kemunculan, mencerminkan komitmen kelembagaan untuk merancang kerangka regulasi dan mekanisme pendukung yang konkret.

Walaupun komitmen normatif dan perencanaan strategis universitas sangat jelas, pola linguistik yang lebih halus mengungkap hambatan struktural yang masih harus diatasi. Munculnya kata “tantangan” sebanyak 30 kali, “keterbatasan” 22 kali, serta “anggaran” 19 kali, menandai adanya kesadaran mendalam dari para pemangku kepentingan terhadap kendala pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia terlatih. Hal ini menunjukkan bahwa, di satu sisi, visi inklusi telah tertanam kuat dalam diskursus, ditandai oleh 42 kemunculan kata “inklusi” dan 75 tema “Inklusi”—namun di sisi lain masih dibayangi realitas administratif dan fiskal yang membutuhkan perhatian lebih.

Keseimbangan antara dimensi teknis-administratif, seperti penyediaan fasilitas dan alokasi anggaran, dengan semangat transformatif yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan mahasiswa, menjadi hal utama untuk mendorong kebijakan inklusi dari fase perencanaan menuju operasionalisasi. Narasi dalam *word cloud* ini memperlihatkan bahwa, meski wacana telah siap mengusung nilai inklusif, implementasi lapangan menuntut penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan tertulis dan praktik nyata di kampus. Dengan ini, analisis *word cloud* memetakan arah strategis berikutnya dalam mengembangkan kebijakan disabilitas yang berkelanjutan dan partisipatif di UIN Bandung.

Interpretasi *word cloud* dan temuan FGD mengungkap dua dimensi utama: komitmen kelembagaan terhadap kebijakan dan layanan inklusi, serta hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ydo, Y. (2020) yang menegaskan bahwa tanpa dukungan kebijakan formal dan mekanisme layanan yang jelas, upaya inklusi di perguruan tinggi gagal berlanjut ke tahap implementasi nyata. Dalam konteks kebijakan publik, kerangka *policy cycle* oleh Howlett dan Ramesh (2009), mulai dari agenda setting, formulation, implementasi, hingga evaluasi, menggarisbawahi pentingnya fase formulasi yang berbasis bukti serta partisipasi pemangku kepentingan sebelum kebijakan diterapkan.

Kata kunci “inklusi” yang sering muncul mencerminkan internalisasi nilai inklusi seperti yang dikemukakan Ainscow, Booth, & Dyson (2006), di mana inklusi bukan hanya akses fisik tetapi juga partisipasi penuh dalam aktivitas akademik. Namun, kecenderungan diskursus masih terfokus pada aspek teknis, fasilitas dan anggaran mengindikasikan bahwa dimensi kultural dan pedagogis belum sepenuhnya diangkat. McLeskey, J., et al (2014) menekankan bahwa inklusi efektif menuntut perubahan kurikulum dan pelatihan dosen dalam metode *Universal Design for Learning (UDL)*, agar materi dan proses belajar dapat diakses oleh berbagai ragam kebutuhan.

Di samping itu, hambatan “anggaran” dan “SDM” sejalan dengan temuan Matland (1995) tentang implementasi kebijakan: fase implementasi sering terkendala oleh masalah sumber daya dan kapabilitas administratif. Padahal, dalam *participatory action research* (Stringer, 2014), keberhasilan perubahan kebijakan sangat bergantung pada pemberdayaan aktor lokal dalam hal ini mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama merancang dan mengevaluasi mekanisme layanan inklusi. Berdasarkan integrasi teori dan penelitian terdahulu ini, pembahasan selanjutnya akan merumuskan *policy matrix* yang secara sistematis merinci apa yang harus dilakukan, oleh siapa, dengan mekanisme bagaimana, serta indikator keberhasilan dan sumber daya yang diperlukan. *Policy matrix*

ini diharapkan menjadi alat ilmiah yang menjembatani antara temuan empiris *FGD* dan kerangka kebijakan publik yang telah teruji;

**Tabel 1.** Policy Matrix kebijakan inklusi disabilitas di UIN Bandung

| Tindakan                                                | Penanggung Jawab                                                            | Mekanisme Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicator Ukuran Keberhasilan                                                                                                                                                          | Sumber Daya                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Formulasi &amp; Sosialisasi Kebijakan Inklusi</b> | - Rektor & Senat Universitas<br>- Biro Hukum & Kerja Sama                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan <i>University Disability Policy</i> dan SOP aduan disabilitas</li> <li><i>Workshop</i> internal dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang kebijakan baru</li> <li>Audit aksesibilitas seluruh gedung oleh tim <i>SI (Sistem Informasi) &amp; Facilities</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan disabilitas terbit resmi dan diunggah di portal kampus</li> <li>Jumlah peserta <i>workshop</i> <math>\geq 200</math> orang</li> </ul> | Anggaran sosialisasi, fasilitator eksternal, platform <i>LMS</i>  |
| <b>2. Peningkatan Akses Infrastruktur &amp; Layanan</b> | - Wakil Rektor II (Administrasi & Keuangan)<br>- BAAK                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renovasi prioritas (<i>ramps, lift, toilet</i> khusus)</li> <li>Unit layanan disabilitas online 24/5</li> <li>Seri pelatihan UDL dan komunikasi inklusif untuk dosen &amp; staf (4 <i>batch</i>/tahun)</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>% gedung utama aksesibel <math>\geq 90\%</math> pada akhir tahun</li> <li>Respon layanan <math>&lt; 24</math> jam</li> </ul>                    | Anggaran renovasi, kontraktor, staf unit layanan                  |
| <b>3. Program Pelatihan &amp; Pendampingan</b>          | - Pusat Sumber Daya Manusia & Pengembangan SDM<br>- Pusat Studi Disabilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skema pendampingan <i>peer-to-peer</i> mahasiswa disabilitas</li> <li>Bentuk Forum Diskusi Terbuka triwulanan (<i>in-person &amp; virtual</i>) untuk evaluasi kebijakan</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 75\%</math> dosen/staf mengikuti pelatihan setiap tahun</li> <li>Skor kepuasan pelatihan <math>\geq 4/5</math></li> </ul>            | Fasilitator <i>UDL</i> , modul <i>e-learning</i> , ruang training |
| <b>4. Partisipasi &amp; Ko-Desain Kebijakan</b>         | - BEM & Unit Disabilitas<br>- Pusat Penelitian & Pengabdian                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem saran/<i>mos</i> via portal "<i>SpeakUp</i>" mahasiswa</li> <li><i>Dashboard KPI</i> inklusi (laporan <i>real-time</i> via <i>PowerBI/NVivo</i>)</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 8</math> rekomendasi mahasiswa diangkat ke Senat tiap tahun</li> <li>Tingkat partisipasi <math>\geq 60\%</math></li> </ul>           | <i>Platform e-feedback</i> , moderator, ruang pertemuan           |
| <b>5. Monitoring, Evaluasi &amp; Pelaporan Berkala</b>  | - <i>Biro Quality Assurance (QA)</i><br>- <i>SPI (Inspektorat Akademik)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Survey kepuasan dan progress report triwulanan ke senat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan <i>M&amp;E</i> dipublikasikan tiap triwulan</li> <li>Indeks kepuasan layanan <math>\geq 85\%</math></li> </ul>                          | <i>Software BI</i> , anggaran survey, tim <i>QA &amp; SPI</i>     |

Sumber: (Howlett & Ramesh, 2009; Ainscow et al., 2006; PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014)

Tabel 1. Matriks ini mengintegrasikan temuan *FGD*, *word cloud NVivo*, serta kerangka teori implementasi kebijakan (Howlett & Ramesh, 2009) dan prinsip inklusi transformatif (Ainscow et al., 2006). Interpretasi *policy matrix* ini menegaskan bahwa setiap target persentase, mulai dari capaian gedung aksesibel, tingkat partisipasi pelatihan, hingga indeks kepuasan layanan— elah dirancang dengan mengacu langsung pada ketentuan teknis PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seperti, persentase aksesibilitas gedung minimal 90 % merupakan adaptasi dari standar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Eselon II yang mensyaratkan capaian *output* unit kerja sekurang-kurangnya di kisaran 75–90 %, sehingga target ini realistis namun tetap menantang. Demikian pula, target 75 % dosen dan staf tersertifikasi *UDL* per tahun bukan sekadar angka arbitrer, melainkan turunan langsung dari pedoman penetapan target kinerja *output* dalam Lampiran I PermenPAN-RB, yang juga menekankan agar indikator bersifat *SMART*—spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Mekanisme pelaporan triwulanan dan review internal masing-masing mengikuti tata cara yang diuraikan pada Lampiran II PermenPAN-RB, sehingga data *real-time* pada *dashboard KPI* inklusi

dapat dipantau, divalidasi, dan direviu sebelum dilaporkan resmi ke Senat. Dengan demikian, matriks ini dapat menjadi alat akuntabilitas yang terintegrasi dalam sistem pemerintah, memastikan bahwa implementasi kebijakan disabilitas di UIN Bandung tersusun, terukur, dan dapat dievaluasi secara rutin berdasarkan standar nasional. Dengan menjalankan setiap langkah sesuai mekanisme yang diuraikan, UIN Bandung dapat bergerak dari komitmen normatif menuju operasi inklusif yang berkelanjutan, terukur, dan partisipatif.

Sebagai keterangan tambahan, beberapa akronim yang perlu diketahui adalah; BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) bertugas mendukung layanan administratif bagi mahasiswa penyandang disabilitas. *SI & Facilities* melakukan audit teknis dan pengerjaan lapangan. Sistem "SpeakUp" dapat memanfaatkan modul umpan balik di portal akademik yang sudah ada, sehingga biaya minimal. Dengan matriks ini, setiap langkah memuat aktor yang jelas, mekanisme praktis, indikator kuantitatif, dan alokasi sumber daya yang realistis, sehingga universitas dapat segera menindaklanjuti dan memonitor kemajuan kebijakan inklusi disabilitas.

#### 4. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa UIN Bandung, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka, memiliki komitmen dan tanggung jawab besar dalam menciptakan kampus yang inklusif dan menyediakan hak yang sama bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Langkah menuju inklusivitas ini sudah dimulai sebagai komitmen institusi untuk menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan akademik yang sering kali menghalangi mahasiswa disabilitas dalam mencapai potensi mereka secara penuh.

Namun, sebagai bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas, UIN Bandung perlu memperkuat penyebaran informasi bagi calon mahasiswa disabilitas dengan menyediakan panduan yang komprehensif melalui platform online dan offline sehingga, calon mahasiswa disabilitas dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fasilitas dan dukungan yang tersedia dan mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan akademik di lingkungan kampus. Aksesibilitas juga harus diprioritaskan selama masa studi untuk menciptakan pengalaman belajar yang setara bagi mahasiswa disabilitas. Rekomendasi kebijakan mencakup pelatihan pengajaran inklusif bagi dosen, penyediaan fasilitas fisik yang memadai, dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat pendukung bagi mahasiswa disabilitas di seluruh aspek kehidupan akademik. Selain itu, setelah masa studi, UIN Bandung perlu mengembangkan program karier yang ramah disabilitas dan menjalin kolaborasi dengan lembaga eksternal yang peduli terhadap keberagaman. Pendekatan ini dapat membuka peluang karier, magang, serta akses informasi pendidikan lanjutan yang inklusif, sehingga lulusan disabilitas dapat bertransisi ke dunia kerja atau pendidikan lebih tinggi dengan lebih percaya diri.

Berdasarkan temuan ini, dengan komitmen yang terstruktur dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, UIN Bandung dapat membuat kebijakan disabilitas (*disability policy*) untuk membangun lingkungan akademik yang inklusif dan mendorong peran aktif mahasiswa disabilitas dalam masyarakat. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga berfungsi sebagai model bagi perguruan tinggi lain dalam menciptakan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah mendanai keberlangsungan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus Dkk. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.

- Akoto, Y., Nketsia, W., Opoku, M. P., Fordjour, M. O., & Opoku, E. K. (2022). Applying A Socio-Ecological Model To Understand The Psychosocial Support Services Available To Students With Disabilities In Universities. *Education Policy Analysis Archives*, 30. <https://doi.org/10.14507/Epaa.30.7237>
- Alrusaiyes, R. Fahad 2024. "Faculty Attitudes Toward Students With Disabilities In The Kingdom Of Saudi Arabia: A Mixed-Methods Study." *Sage Open*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/21582440231225583>.
- Bajnok, A., Kriskó, E., Korpics, F., Korpics, M. K., & Milován, A. (2024). Focus Group Discussion as a Method of Data Collection in Higher Education and Related Fields. *Pro Publico Bono–Public Administration*, 12(2), 23-41.
- Brewer, G., Urwin, E., & Witham, B. 2023. "Disabled Student Experiences Of Higher Education." *Disability & Society*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2263633>
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research?. *Social science & medicine*, 41(12), 1667-1676.
- Degener, T. (2016). Disability In A Human Rights Context. *Laws*, 5(3). <https://doi.org/10.3390/Laws5030035>
- Dustman, E. L., Kohan, M. B., & Stringer, E. T. (2014). Starting small and building out with Ernie Stringer: Personal insights into action research and educational change. *Action Research*, 12(4), 426-443.
- Dyliaeva, K., Rothman, S. B., & Ghotbi, N., 2024. "Challenges To Inclusive Education For Students With Disabilities In Japanese Higher Education Institutions." *Higher Learning Research Communications*, 14(1): 1–18. <https://doi.org/10.18870/Hlrc.V14i1.1453>
- Espada-Chavarria, R., Diaz-Vega, M., & González-Montesino, R. H. (2021). Open Innovation For An Inclusive Labor Market For University Students With Disabilities. *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/Joitmc7040217>
- Fernández-Batanero, Jm, Montenegro-Rueda M, Fernández-Cerero J. 2022. "Access And Participation Of Students With Disabilities: The Challenge For Higher Education." *Int J Environ Res Public Health*. 21;19(19):11918. Doi: 10.3390/Ijerp191911918. Pmid: 36231217; Pmcid: Pmc9565787.
- García, O. M., Zambrano, M. A. Y., Niclot, D., & Philippot, T. (2019). Inclusive University: Perceptions Of Disability Support Services. *Revista Electronica De Investigacion Educativa*, 21(1). <https://doi.org/10.24320/Redie.2019.21.E20.1972>
- García, P. Solis, Real Castelaio, S, Barreiro-Collazo, A. 2024. "Trends And Challenges In The Mental Health Of University Students With Disabilities: A Systematic Review." *Behav Sci (Basel)*. 2;14(2):111. Doi: 10.3390/Bs14020111. Pmid: 38392464; Pmcid: Pmc10886039.
- Gin, Logan E., Danielle Pais, Katelyn M. Cooper, And Sara E. Brownell. 2022.
- Heffernan, T. 2023. "Failing At The Basics: Disabled University Students' Views On Enhancing Classroom Inclusion." *Oxford Review Of Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/03054985.2023.2281314>.
- Heyer, K. (2021). What Is A Human Right To Inclusive Education? The Promises And Limitations Of The Crpd's Inclusion Mandate. *International Handbook Of Inclusive Education*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (Vol. 3). Oxford: Oxford university press. <https://doi.org/10.1016/J.ljer.2013.02.008>.
- Kartika, I. A., Gading, S., Dewi, P., Maulidina, F. R., Nugroho, H. A., Novitasari, A. P., Nugraha, J. T., & Tidar, U. (2024). Fasilitas Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Tidar. *Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa)*, 1(3).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Krueger, R. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage publications.

- Mariska, R., Aulia, D. M., & Septiana, F. I. (2024). The Urgency Of Disability Service Units In Higher Education As An Effort To Realize Inclusive Access To Higher Education. *Proceeding Of International Conference On Special Education In South East Asia Region*, 3(1), 520–525. <https://doi.org/10.57142/Picsar.V3i1.472>
- Mathie, Alison & Cunningham, Gord. 2003. "From Clients To Citizens: Asset-Based Community Development As A Strategy For Community-Driven Development." *Development In Practice*. 13. 474-486. 10.1080/0961452032000125857.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of public administration research and theory*, 5(2), 145-174.
- Mcknight, John & Cormac Russell. 2018. *Four Essential Elements Of An Asset-Based Community Development Process*. Asset-Based Community Development Institute At Depaul University.
- McLeskey, J., Waldron, N., Spooner, F., & Algozzine, B. (2014). *Handbook of effective inclusive schools*. New York, NY: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mogaji, E., & Nguyen, N. P. 2022. "Enhancing The Work Placement Experience Of Students With Disabilities." *Industry And Higher Education*, 36(6), 768-783. <https://doi.org/10.1177/0950422221122958>
- Moriña, Anabel & Biagiotti, Gilda. 2022. "Academic Success Factors In University Students With Disabilities: A Systematic Review." *European Journal Of Special Needs Education*. 37. 729-746. 10.1080/08856257.2021.1940007.
- Nurdiyanah Dkk. 2016. *Panduan Pelatihan Dasar Asset Based Community-Driven Development (Abcd)*. Makassar: Nur Khairunnisa.
- Oslund, C. 2014. "Disability Services And Disability Studies In Higher Education: History, Contexts, And Social Impacts." 10.1057/9781137502445.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Riddell, Sheila, Elisabet Weedon. 2014. "Disabled Students In Higher Education: Discourses Of Disability And The Negotiation Of Identity," *International Journal Of Educational Research*, Volume 63: 38-46,
- Ristad, Tone,, Jørn Østvik, Sissel Horghagen, Lisbeth Kvam, Aud Elisabeth Witsø. 2024. "A Multi-Stakeholder Perspective On Inclusion In Higher Education: Ruling On Fragile Ground", *International Journal Of Educational Research Open*, Volume 6, 100311, <https://doi.org/10.1016/J.Ijedro.2023.100311>.
- Setyawan, Wawan Herry Dkk. 2022. *Asset Based Community Development (Abcd)*. Samarinda: P.T. Gaptek Media Pustaka.
- Simkiss, D. (2013). The United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. In *Paediatrics And Child Health (United Kingdom)* (Vol. 23, Issue 10). <https://doi.org/10.1016/J.Paed.2013.04.012>
- Witham, Beth, And Gayle Brewer. 2024. "'Giving The People Who Use The Service A Voice": Student Experiences Of University Disability Services" *Disabilities* 4, No. 1: 1-10. <https://doi.org/10.3390/Disabilities4010001>
- Ydo, Y. (2020). Inclusive education: Global priority, collective responsibility. *Prospects*, 49(3), 97-101.
- Zhou, Ziqian. 2023. "Disabilities In Higher Education: Beyond 'Accommodation'", *Journal Of Disability Studies In Education* 3, 2: 191-216, Doi: <https://doi.org/10.1163/25888803-Bja10021>